



Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun:

2	0	2	4
---	---	---	---

Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media:	Radar Sampit	Halaman: 13
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post ✓		Tabengan

Pemeriksaan BPK Penting Bagi Transparansi Keuangan Daerah

PALANGKA RAYA, PPOST

Saat ini Pemerintahan Kota (Pemkot) Palangka Raya tengah menjalani pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kalteng.

Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya, Wahid Yusuf, mengatakan bahwa langkah ini sebagai upaya transparansi keuangan daerah. Sehingga pertanggungjawaban penggunaan dana bisa diketahui.

"Pemeriksaan LKPD merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, karena sudah sewajarnya dana yang di berikan oemerintah pusat dapat di jalankan sesuai kepwrutukannya bagi masyarakat," papar Wahid, Selasa (6/2).

Wahid mengatakan, harapannya dari hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik



Wahid Yusuf

dari pemerintah Kota Palangka Raya.

"Tentunya pihak DPRD mendukung sepenuhnya pemeriksaan LKPD 2023 oleh BPK, dengan begitu penggunaan anggaran dapat di rasakan oleh masyarakat banyak," tukasnya.

Sementara itu pihak Pemkot berkomitmen untuk bekerjasama dengan BPK dalam memberikan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Pemeriksaan LKPD dari BPK RI merupakan pemeriksaan rutin yang dilakukan setiap tahun untuk menilai kewajaran dan kepatuhan pada pengelolaan keuangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan.

"Nantinya hasil pemeriksaan LKPD 2023 akan menjadi dasar bagi penentuan opini dan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bagi pemerintah daerah terkait," pungkas Wahid. (mg2/P4)